

STUDI ANALISIS KONSEP IDEOLOGI MARHAENISME SUKARNO SEBAGAI ASAS PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

Febri Fajar Pratama*, Ai Kusmiati Asyiah, Deni Chandra

Universitas Perjuangan, Jawa Barat, Indonesia

*febripratama@unper.ac.id

Abstract

Ideology is important in the order of social and state life. Philosophically, the concept of ideology is very subjective. There are those who consider ideology as dogma, while others are concerned with linking ideology as political discourse and political views. Meanwhile, some think that ideology is based on the concrete interests of social class which is marked by the absence of interest on an economic basis. In the socio-historical context of the Indonesian nation, ideology is used as a "tool" for the struggle to form the mental, character, spirit and thoughts of anti-colonialism, so as to create a manifestation of the fundamental values of Indonesia in the form of Pancasila formulated by national figures. The purpose of this research is to study and analyze the concept of Sukarno's Marhaenism ideology which became the forerunner of thoughts/ideas about Pancasila. The method used is concept analysis with a qualitative approach. Based on the results of the analysis carried out, the results show that marhaenism conceptually emphasizes aspects of the struggle of the marhaens, namely the groups exploited by imperialism and capitalism so that they have difficulty being able to prosper themselves. The important elements in the ideology of Marxism are socio-nationalism, socio-democracy, mass-action, machtvorming, non-cooperation, and self-reliance.

Keywords: *ideology, marhaenism, principles of struggle.*

Abstrak

Ideologi menjadi hal yang penting dalam tatanan kehidupan sosial maupun bernegara. Secara filosofis, konsep ideologi sangatlah subjektif. Ada yang menganggap ideologi sebagai dogma, ada juga yang menyangkutpautkan ideologi sebagai diskursus politik dan pandangan politik. Sedangkan sebagian lagi menganggap ideologi didasarkan pada kepentingan konkret kelas sosial yang ditandai oleh tidak adanya kepentingan atas dasar ekonomi. Dalam sosio-historis bangsa Indonesia, ideologi dijadikan sebagai "alat" perjuangan untuk membentuk mental, karakter, semangat dan pemikiran anti kolonialisme, sehingga terciptalah manifestasi dari nilai-nilai fundamental keindonesiaan berupa Pancasila yang dirumuskan oleh para tokoh nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis konsep tentang ideologi Marhaenisme Sukarno yang menjadi cikal bakal pemikiran/gagasan mengenai Pancasila. Metode yang digunakan adalah analisis konsep dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan didapatkan hasil bahwa marhaenisme secara konseptual menekankan pada aspek perjuangan kaum marhaen, yaitu kelompok yang dieksploitasi oleh imperialisme dan kapitalisme sehingga mereka kesulitan untuk bisa mensejahterakan dirinya. Adapun unsur-unsur penting dalam ideologi marhaenisme yaitu sosio-



nasionalisme, sosio-demokrasi, aksi-massa, *machtvorming*, non-kooperasi, dan *self-reliance*.

Kata kunci: ideologi, marhaenisme, asas perjuangan

PENDAHULUAN

Marhaenisme merupakan sebuah konsep ideologi yang digagas oleh Sukarno muda sebagai hasil kontemplasi dan buah pikiran dari suasana kebatinan pada saat Indonesia masih digenggam oleh kekuatan imperialisme asing. Sukarno dengan idealisme dan semangat anti penindasan merasa bahwa kolonialisme merupakan hal yang harus ditentang habis-habisan karena tidak sesuai dengan prinsip berkeadilan. Pada masa kolonial Belanda, Sukarno dengan terang-terangan dan tegas menentang semua kebijakan pemerintah Hindia-Belanda yang mengendalikan sektor ekonomi, pemerintahan dan tatanan sosial masyarakat, sehingga kaum pribumi menjadi termarginalkan dan tertindas.

Marhaenisme merepresentasikan diri sebagai kaum Marhaen atau lebih dikenal dengan istilah *wong cilik* (rakyat kecil) yang dapat diidentifikasi dari tingkat penghasilan dan mata pencaharian. Melawati & Kuswono (2018) mengartikan *wong cilik* sebagai rakyat biasa yang tingkat ekonominya rendah, pendidikan rendah dan juga terbelakang. Konsep daripada Marhaenisme itu sendiri, diungkapkan oleh Kuswono (2016) muncul dari hasil perjuangan revolusioner Sukarno untuk membebaskan kaum Marhaen dari penindasan kolonialisme Belanda. Pemikiran Sukarno tentang Marhaenisme sebagian besar banyak dipengaruhi tokoh-tokoh sosialis barat, salah satunya yaitu Karl Marx dengan Marxismenya yang mengangkat isu perjuangan kelas. Meskipun paham Marhaenisme terpengaruh ideologi asing seperti marxisme, *core* dari konsep Marhaenisme lebih menekankan pada perjuangan secara holistik, yakni perjuangan antara yang terjajah dengan yang menjajah, bukan eksklusif pada kaum proletar melawan kaum borjuis kapitalis (Melawati & Kuswono, 2018).

Berangkat dari pemahaman Marhaenisme tersebut, Sukarno dengan idealismenya mulai berani mengungkapkan pandangannya tentang Marhaenisme, bahwa akar Marhaenisme ditegakkan di atas 4 sila, yaitu Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Nasionalisme atau Peri Kebangsaan, Demokrasi, dan Kesejahteraan Sosial, yang kemudian disingkat oleh Bung Karno dengan istilah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi (Parwanto, 2015). Bahkan Bung Karno (1964) sempat mengatakan dalam salah satu pidatonya yang ditulis dalam buku "Tjatkan Pantjasila!: Pantjasila Dasar Falsafah Negara," bahwa "...Marhaenisme adalah Marxisme yang diselenggarakan, ditjotjokkan, dilaksanakan di Indonesia." Marxisme yang dimaksud Bung Karno adalah Marxisme yang disesuaikan dengan keadaan bangsa Indonesia yang menekankan pada politik persatuan seluruh rakyat. Konsep yang menjadi landasan pokok paham Marhaenisme menurut pemikiran Sukarno meliputi: Radikal-revolusioner, Non-kooperatif, Massa-aksi, *Machtvorming*, dan *Self help & Reliance*. Ke-5 asas perjuangan tersebut kemudian digunakan oleh Bung Karno sebagai landasan dalam menjalankan ideologi Marhaenisme.

Ideologi Marhaenisme terus berkembang seiring dengan semakin kuatnya pengaruh Sukarno sebagai penggerak dan pemimpin bagi kaum Marhaen. Tak hanya berkembang dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi pemahaman. Pada sidang BPUPKI, ketika Bung Karno merumuskan konsep Pancasila, beliau menyadari bahwa gagasan tentang paham

Marhaenisme perlu mengakomodasi semua golongan, salah satunya adalah golongan Islam. Maka dari itu, Bung Karno mencoba mensintesakan pemahaman Marhaenisme dengan ajaran Islam agar dapat diterima. Adapun gagasan yang coba diakomodasi Bung Karno adalah mengenai asas ketuhanan dan menyelipkan nilai ketauhidan, bahwa Allah itu satu, sebab dari segala sebab (causa prima), Tuhan yang Maha Esa. Konsep mengenai Pancasila yang semula terdiri dari 4 sila yang diperas dari nilai-nilai gagasan Marhaenisme (sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi) akhirnya menjadi 5 sila dengan penambahan asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Marhaenisme masih menjadi “-isme” yang melekat pada diri Bung Karno. Banyak yang mengaku Marhaenis, namun beberapa justru menyimpang dari Marhaenisme Bung Karno. Sempat dalam pidatonya dulu ketika menjelaskan konsep rumusan Pancasila di depan rakyat Indonesia, Sukarno (1964) mengatakan:

“...Kalau dihubungkan dengan nama Bung Karno, saja minta supaya Marhaenismenja itu seperti Marhaenismenja Bung Karno. Djanganlah kok sekedar isme-isme lantas dikatakan inilah Marhaenisme tulen. Nanti dulu, tanja dulu sama Bung Karno. Sebab, katakanlah jang mentjptakan Marhaenisme Bung Karno; dus tanja dulu apa jang dimaksudkan oleh Bung Karno dengan Marhaenismenja. Kalau tidak tjojok dengan Marhaenisme Bung Karno itu, kasihlah nama lain; djangan dikatakan Marhaenisme”.

Pasca kemerdekaan, ideologi Marhaenisme Sukarno mengalami pasang surut akibat gejolak politik dalam negeri dan berbagai peristiwa disintegrasi nasional yang terjadi. Pada masa peralihan kekuasaan tahun 1966, ketika Sukarno jatuh karena peristiwa Gestapu (Gerakan 30 September 1965) Indonesia memasuki pemerintahan orde baru. Saat itu, Soeharto sebagai presiden terpilih menggantikan Sukarno melarang adanya eksistensi paham kiri, salah satunya yaitu Marhaenisme Sukarno. Bahkan, ada upaya untuk melakukan de-Sukarnoisasi (Sophiaan, 1994), sehingga siapapun yang berseberangan dengan politik pemerintah akan dianggap sebagai penghambat kemajuan negara. Menanggapi hal tersebut, elit-elit politik pada waktu itu, terutama pengikut Sukarno mencoba untuk tetap membawa dan menjaga eksistensi paham Marhaenisme dengan cara “menyisipkan” paham tersebut dalam ideologi organisasi infrastruktur politik seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan mahasiswa.

Hingga saat ini, ideologi Marhaenisme masih menjadi ciri pemikiran Bung Karno, meskipun implementasi dan nilai-nilai dalam Marhaenisme itu sendiri sudah jauh bergeser dan tidak lagi berada pada “ruh” nya, terutama para politikus yang menganggap dirinya sebagai Marhaenis, namun justru malah menjadi elitis, oportunis dan pragmatis (Dewantara, 2017). Keadaan Indonesia dewasa ini yang dianggap mengalami fase post-imperialisme dan kapitalisme diberbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, politik dan budaya membuat banyak kalangan kembali melirik konsep marhaenisme dan trisakti yang dahulu pernah digaungkan oleh Sukarno, yakni berdikari dalam ekonomi, bebas dalam politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Bahkan, Presiden Jokowi melalui pidato sambutannya dalam acara forum konferensi GMNI sempat mengatakan “Marhaenisme adalah cara perjuangan yang revolusioner. Kaum Marhaen harus mengembangkan masyarakat yang kuat, bahagia, sentosa, adil dan makmur” (Lumanauw, 2015). Banyak penelitian yang membahas mengenai Marhaenisme, namun sebagian besar berfokus pada lingkup kajian sejarah dan sebagian lagi hanya menjadi sub tema dari pemikiran Bung Karno. Seperti penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Melawati & Kuswono

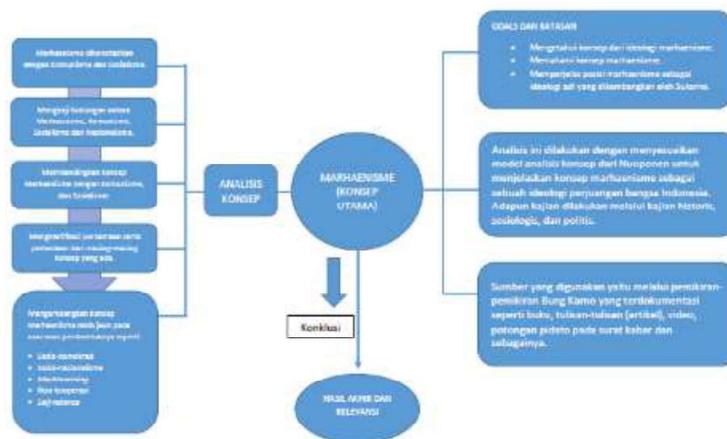
(2018) yang mengkaji paham marhaenisme melalui pendekatan historis yang menghasilkan kesimpulan bahwa paham marhaenisme menjadi simbol kebangkitan dan semangat jiwa seluruh rakyat Indonesia yang bebas dari segala bentuk penjajahan baik bersifat fisik maupun non-fisik. Marhaenisme juga dikaitkan dengan perlawanan masyarakat yang tertindas oleh sistem kapitalisme, imperialisme, feodalisme, dan kolonialisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis konsep dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih dengan mempertimbangkan aspek kedalaman analisis. Seperti dikatakan oleh Pratama & Mutia (2020) bahwa “penelitian kualitatif dilakukan untuk menemukan kebenaran dalam kerangka pemecahan masalah sebagai sarana untuk membangun prinsip, konsep, teori keilmuan atau model yang berkenaan dengan masalah yang diteliti”.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Peneliti mengumpulkan semua buku rujukan yang berkenaan dengan konsep pemikiran Bung Karno tentang paham marhaenisme serta sumber dari artikel jurnal yang relevan. Sedangkan untuk analisis data, peneliti mengambil rujukan metode analisis konsep yang dikemukakan dan dikembangkan oleh Nuopponen (2010). Menurut Nuopponen (2010) analisis konsep merupakan “...an activity where concepts belonging to a whole, their characteristics and the relations that they hold within systems of concepts are clarified and described”. Pada dasarnya analisis konsep merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mendefinisikan atau menegaskan karakteristik dan hubungan sebuah konsep yang satu dengan yang lainnya secara jelas.

Gambar 1 Analisis Konsep



Sumber: diadaptasi dari analisis konsep Nuopponen, 2010

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ideologi

Ideologi merupakan ide, pemikiran atau gagasan yang membentuk keyakinan atau paham. Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Perancis, yaitu “*Idéology*” yang terdiri dari 2 suku kata, yakni “*Ideo*” dan “*Logos*” yang dalam bahasa Yunani berarti logika dan rasio. Jika diterjemahkan ke dalam pengertian secara terminologis, “*Idéology*” dapat diartikan sebagai “..Ilmu yang mengkaji tentang hakikat ide dan gagasan.” Al Muchtar (2016) mendefinisikan ideologi sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Sedangkan Suseno (2015) mengartikan ideologi dari 2 sudut pandang, yakni secara luas dan sempit. Ideologi secara luas digunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sedangkan dalam arti sempit, ideologi merupakan gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang ingin ditentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Selanjutnya, ideologi dalam arti sempit tersebut oleh Suseno disebut sebagai ideologi tertutup karena sifatnya yang memaksa dan mengatur.

Jika kita tinjau secara etimologis maupun terminologis, ideologi bukan hanya sekedar ide maupun gagasan dalam bentuk konsep kerangka pemikiran yang mengawang-awang atau utopis. Maimun (2015) dalam artikelnya mengungkapkan konsep ideologi dari beberapa pemikiran pakar, yakni Gramsci dan Roger Simon yang mendeskripsikan ideologi sebagai pemahaman yang tidak terbatas pada alam pikiran maupun sistem kehidupan, tetapi ideologi bersifat dinamis. Ideologi mempunyai eksistensi materialnya dalam berbagai aktivitas praktis tersebut. Ia memberikan berbagai aturan bagi tindakan praktis serta perilaku moral manusia, dan ekuivalen dengan agama dalam makna sekulernya, yaitu pemahaman antara konsepsi dunia dan norma tingkah laku. Oleh karena itu, ideologi merupakan pedoman atau aturan yang mengatur manusia dalam bertindak untuk mencapai orientasi politik maupun ekonomi. Pengertian tersebut juga senada dengan apa yang diungkapkan oleh Al Muchtar (2016) bahwa tugas utama dari suatu ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ini sejalan dengan pemaknaan bahwa ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekedar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik tetapi masuk pada ranah individu untuk membentuk suatu sistem nilai, sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik.

Sastraprteja (1991) lebih luas menjabarkan pengertian ideologi sebagai “seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur.” Sastraprteja juga menjelaskan beberapa unsur yang terkandung di dalam ideologi, yaitu:

- a) Adanya suatu penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan;
- b) Setiap ideologi memuat seperangkat nilai-nilai atau suatu preskripsi moral;
- c) Ideologi memuat suatu orientasi pada tindakan, ideologi merupakan suatu pedoman kegiatan untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat di dalamnya.

Sebagai bentuk pemahaman tentang kenyataan, ideologi berbeda dari pandangan hidup, karena ideologi lebih eksplisit dan tegas dalam perumusannya. Ideologi dalam hal

ini berbeda pula dari ilmu pengetahuan yang merupakan hasil dari analisis objektif terhadap fakta dan kebenarannya dapat diuji. Namun, antara ideologi dan ilmu pengetahuan tidak perlu ada pertentangan. Salah satu kecenderungan ideologi adalah melebih-lebihkan sudut pandangnya dan kerap kali menjadi doktriner, dalam arti cenderung mengklaim seluruh kebenaran, sehingga pemahaman mengenai kenyataan mengalami distorsi. Terhadap ideologi ilmu pengetahuan dapat berfungsi meluruskan distorsi tersebut dan membuat lebih realistis. Sebaliknya, ideologi dapat memberikan dorongan pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan orientasi pemanfaatannya.

Salah satu fungsi penting lainnya dari ideologi adalah membentuk identitas kelompok atau bangsa. Ideologi memiliki kecenderungan untuk “memisahkan” *ingroup* (kita) dari *outgroup* (mereka). Dengan demikian, ideologi berfungsi mempersatukan. Apabila kita bandingkan dengan agama, agama berfungsi juga mempersatukan orang dari berbagai pandangan hidup bahkan dari berbagai ideologi. Sebaliknya ideologi mempersatukan orang dari berbagai agama. Oleh karena itu, ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial.

Dengan demikian ideologi berfungsi sebagai apa yang disebut oleh Sastraprteja (1991) sebagai “*solidarity making*,” dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai yang lebih tinggi. Fungsi pemersatuan tersebut bisa terlihat melalui semboyan seperti “Kesatuan dalam perbedaan” atau “Perbedaan dalam kesatuan.” Dalam kasus-kasus tertentu, ideologi dapat juga menciptakan ketegangan apabila ideologi itu merupakan ideologi yang dipaksakan oleh sekelompok kecil orang. Dari sejumlah definisi dan pemaknaan ideologi tersebut, dapat diidentifikasi ciri-ciri konsep ideologi yang secara umum menurut Al Muchtar (2016) dapat dicirikan melalui dua dimensi kajian, yaitu dimensi kajian sosiologis yang membahas tentang ideologi di dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat penuh dengan ragam ideologi yang muncul sebagai hasil pemikiran perorangan atau kolektif dalam menemukan gagasan komprehensif untuk membangun dan mengaktualisasikan berbagai kepentingan bersama. Kemudian dimensi kajian ideologi dari aspek ilmu politik yang bermuara dari filsafat politik. Ideologi sebagai konsep politik dan dihasilkan dari pemikiran politik untuk dikembangkan menjadi lembaga politik dan digunakan untuk mencapai tujuan politik. Kedua kajian ini saling melengkapi dalam memberikan makna ideologi.

Marhaenisme Bung Karno

Setelah melakukan analisis konsep dari istilah marhaenisme, didapatkan relasi marhaenisme Bung Karno dengan konsep ideologi lain yang mempengaruhi landasan berpikir Bung Karno ketika itu. Adapun konsep-konsep tersebut meliputi: sosialisme, komunisme, nasionalisme, dan islamisme. Secara harfiah, istilah marhaenisme merujuk kepada nama seorang petani yang tidak sengaja Bung Karno temui ketika sedang mengayuh sepedanya ke daerah persawahan di selatan Kota Bandung. Ia kemudian berhenti sejenak dan memperhatikan petani tersebut. Lalu tanpa ragu Bung Karno menghampirinya dan berdialog untuk menggali informasi mengenai kondisi sebenarnya si petani itu. Melalui obrolan-obrolan tersebut, Bung Karno mendapatkan fakta dari sang Petani bahwa sawah yang ia garap merupakan sawah miliknya yang diwariskan dari orang tuanya, alat-alat yang digunakan untuk membajak sawah juga merupakan miliknya, namun hasil yang didapat tidak dijual kembali lantaran hanya cukup

untuk memberi makan keluarganya saja. Kejadian tersebut yang kemudian mengilhami Bung Karno untuk menamai konsep yang selama ini ia kembangkan tentang sosialisme khas Indonesia dengan nama “Marhaen.” Pada akhirnya, istilah marhaen menjadi paham yang digunakan untuk merepresentasikan rakyat Indonesia yang dimelaratkan oleh imperialisme dan kapitalisme eksploitatif kaum borjuis. Sehingga Bung Karno memosisikan marhaenisme sebagai sosialisme Indonesia dalam praktik (Adams, 2018).

Marhaenisme dapat dikatakan lahir dari alam berpikir Bung Karno yang progresif dan revolusioner. Hal ini tidak lepas dari latar belakang Bung Karno yang memang sedari kecil sudah memiliki antusiasme terhadap politik dan senang berorasi. Jiwa kepemimpinan dan kharismanya juga tidak diragukan lagi, karena di beberapa kesempatan, Sukarno bisa mengorganisir massa dan membakar semangat mereka yang seolah “tenggelam” dalam cita-cita yang ingin diwujudkan Bung Karno. Dengan kepribadian yang dimiliki Sukarno tersebut, maka tidak butuh waktu lama bagi Sukarno untuk dapat menjadi salah satu tokoh pergerakan yang sangat penting. Pemikiran-pemikiran radikal-revolusionernya banyak dipengaruhi oleh para tokoh nasional, salah satunya yaitu Tjokroaminoto yang menjadi mentor politiknya. Melalui Tjokroaminoto, Bung Karno belajar tentang fungsi politik sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat. Dari Tjokroaminoto juga Bung Karno belajar tentang pergerakan modern dan bagaimana memanfaatkan media massa untuk menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan.

Selain itu, di tempat Tjokroaminoto, Bung Karno mendapat berbagai macam pengaruh aliran pemikiran, baik pemikiran kiri maupun kanan. Seperti Ki Hadjar Dewantoro yang memberikan corak pengaruh tentang sintesis pemikiran Barat dan tradisional Jawa. Kemudian Hendrik Sneevliet dan Alimin yang memperkenalkan Sukarno dengan paham komunisme Karl Marx. Lalu ada Douwes Dekker dan Tjipto Mangunkusumo yang berhasil memukau Sukarno dengan konsep nasionalisme, khususnya nasionalisme sekuler. Sedangkan nilai-nilai keislaman sendiri diperoleh Bung Karno dari Tjokroaminoto yang selalu mengingatkan keluarga serta pengikutnya dalam lingkungan organisasi SI (Sarekat Islam) untuk menempatkan Islam sebagai fondasi utama dalam bertindak dan berperilaku sehingga Islam dapat menjadi solusi bagi kebahagiaan umat. Tjokroaminoto juga selalu mengajarkan tentang keberanian, keikhlasan, kesetiaan, dan kecintaan kepada sesuatu yang benar. Dalam pandangan Tjokroaminoto, ilmu itu haruslah diperoleh melalui akal, tetapi jangan sampai dipisahkan dari budi pekerti dan pendidikan ruhani (Wicaksana, 2020).

Pada tataran paham nasionalistik, Bung Karno mewujudkannya melalui gerakan marhaenisme sebagai sosialisme Indonesia dalam praktik yang menekankan pada aspek persatuan rakyat. Hal tersebut kemudian dibandingkan dengan gerakan *swadesi* rakyat India. Bung Karno (2019) menjelaskan bahwa imperialisme yang dilakukan oleh Inggris di India merupakan imperialisme dagang. Maka, untuk terbebas dari model imperialisme tersebut, India membuat gerakan nasionalisme borjuis di mana gerakan tersebut berfokus pada pemboikotan barang-barang buatan Inggris dan berdikari untuk memenuhi kebutuhan negara yang diciptakan dari dalam negeri sendiri sehingga Inggris kesulitan untuk memonopoli perdagangan di India. Beda halnya dengan Indonesia, di Indonesia tidak memiliki nasional borjuis apalagi nasional borjuis yang revolusioner, yang ada hanya *restan* yaitu rakyat jelata yang tidak termasuk ke dalam kelompok-kelompok borjuis itu. Mengapa sulit untuk bisa menggerakkan borjuisme nasional? Hal tersebut dikarenakan model imperialisme Belanda merupakan *finanz-capital* yaitu dengan cara membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan buruh-

buruh murah, sewa tanah murah sehingga banyak dari rakyat Indonesia ketika itu menjadi kaum yang tertindas, tenaganya dieksploitasi dan digunakan hanya untuk keuntungan dan kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga penjajahan di semua lini itulah yang pada akhirnya menghambat borjuisme nasional Indonesia. Menyadari hal tersebut, maka Bung Karno mencoba untuk mempersatukan kaum-kaum tertindas ini, para kaum-kaum progresif yang revolusioner baik dari kelompok proletar maupun non-proletar untuk ikut bergerak bersama dalam wadah perjuangan dan persatuan. Revolusioner dan progresif menjadi hal yang ditekankan oleh Bung Karno dalam pergerakan nasional yang melibatkan seluruh kelompok elemen masyarakat, khususnya kaum marhaen. Hal tersebut sangat penting di atas semua golongan yang ada, karena revolusioner diperlukan untuk mendobrak hegemoni Imperialisme, tidak harus dari golongan proletar, tidak harus dari golongan demokrasi formal, tidak harus dari golongan sosialis, karena di antara golongan-golongan itu tidak semua revolusioner.

Kemudian konsep sosialisme yang Bung Karno gunakan dalam ideologi marhaenisme yaitu sosialisme Indonesia. Sosialisme sendiri diartikan Bung Karno sebagai kehendak untuk memperoleh keadilan secara sama rasa dan sama rata. Sosialisme itu usaha memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan untuk semua manusia tanpa ada eksploitasi. Hal-hal yang terkait dengan sosialis demokrat, anarkis, komunis, utopis sosialis, religius sosialis, nihilistic sosialis, ilmiah sosialis, semua disebut oleh Bung Karno dengan satu istilah, yaitu “Sosialis”.

Mintz (2017) mengatakan jika kita ingin mengetahui makna sesungguhnya dari sosialisme Indonesia, maka kita harus menyelami pemikiran Bung Karno tentang sosialis itu sendiri. Sosialisme Indonesia sangat erat dengan konsep marhaenisme Bung Karno dan juga Marxisme. Bung Karno bahkan pernah mengatakan jika marhaenisme itu adalah Marxismenya Indonesia. Barang siapa yang tidak mempraktekkan Marxisme maka ia hanya seorang pseudo marhaenis. Jika ia menyebut dirinya sebagai seorang yang radikal revolusioner tetapi bukan Marxis, maka dia hanya pseudo Marxis. Sukarno juga membedakan antara sosialisme dan Marxisme, karena menurutnya kedua paham tersebut tidaklah berada dalam satu kesamaan makna. Sosialisme itu akar dari pemikiran Marxisme, tetapi sosialisme tidak identik dengan Marxisme, karena sosialisme memiliki berbagai macam corak. Namun, komunisme sebagai manifesto dari pemikiran Marx, Engels, dan Lenin menjadi tren pergerakan sosialisme di Indonesia. Komunisme memiliki kesamaan tujuan dengan sosialisme, yaitu mendambakan keadilan dan kebahagiaan tanpa adanya eksploitasi. Tetapi, tidak semua aliran sosialisme dapat diterima Bung Karno, salah satunya yaitu sosialisme ala Schermerhorn dengan “sosialisme personal” nya. Aliran ini pada dasarnya meyakini bahwa sosialisme tidak akan bisa diwujudkan selama manusia belum bisa mewujudkan hati yang bersih, maka untuk mencapai itu setiap orang haruslah membersihkan terlebih dahulu hatinya. Hal tersebut tentu tidak bisa dengan mudah dilakukan, apalagi dalam upaya untuk mencapai tujuan kemerdekaan. Bung Karno mengatakan bahwasannya kita tidak bisa menunggu semua orang menjadi bermoral terlebih dahulu untuk mewujudkan sosialisme. Sosialisme justru menekankan pada aspek moralitas yang tinggi, membentuk masyarakat yang bersatu tanpa perbedaan, manusia harus hidup berdampingan, menurunkan egoisme, dan mencapai masyarakat yang sejahtera serta bahagia.

Sosialisme pada akhirnya menjadi hal yang sebenarnya tidak lagi asing di dalam kehidupan rakyat Indonesia itu sendiri. Sosialisme dikatakan oleh Mintz (2017) sebenarnya mengambil bentuk dari kondisi asli bangsa dan gerakan-gerakan nasionalis.

Seperti sikap kepemilikan komunal, gotong royong, dan musyawarah untuk mufakat. Ini yang terjadi di Indonesia khususnya pada masyarakat pedesaan yang dapat disebut sebagai komunisme primitive pra-feodal dan pra-kapitalis. Maka sebenarnya konsep sosialisme terutama komunisme Marxis bukan hal baru dalam sejarah bangsa Indonesia, terutama sebagai paham perjuangan kelas. Bahkan tahun 1890, kelompok Tani yang dipimpin oleh Samin melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial ketika itu karena merasa kebebasannya dirampas oleh aturan-aturan birokrasi yang ditetapkan, salah satunya yaitu pengenaan pajak tanah pertanian. Gerakan tersebut sebenarnya merupakan akumulasi dari ketidakadilan yang selama ini dirasakan oleh para petani di akhir abad ke-19, hal ini juga dipicu oleh adanya sistem *cultursteeleel* (tanam paksa) dan eksploitasi sumber daya alam yang menimbulkan kesengsaraan para petani. Gerakan ini kemudian dianggap sebagai manifestasi komunisme murni Indonesia.

Meski secara tujuan konsep marhaenisme dan komunisme sama, tetapi dalam praktiknya sangat berbeda. Komunisme di Barat menggunakan kaum buruh sebagai kekuatan utama pergerakan untuk melawan kapitalisme dan imperialisme. Sehingga setiap orang harus menganut proletarianisme agar bisa memahami perjuangan kelas yang dilakukan oleh kaum proletar. Sedangkan marhaenisme tidak terpaku pada kaum buruh saja, karena masyarakat Indonesia itu berbeda kondisinya. Tidak bisa menggunakan komunisme yang dipakai di Barat, karena di Barat sana kapitalismenya berupa industrialisasi di berbagai sektor yang menghasilkan kelas proletar, sedangkan di Indonesia kapitalismenya berupa kapitalisme pertanian yang menghasilkan petani-petani yang melarat. Meski begitu, Bung Karno juga tidak menafikan peran buruh sebagai pelopor pergerakan, sehingga marhaen tidak hanya kaum proletar saja, tetapi juga seluruh rakyat yang sengsara, yang ditindas oleh ketidakadilan imperialisme dan kapitalisme yang eksploitatif (Sukarno, 2019).

Meski Marx dan komunismenya menjadi landasan pemikiran pergerakan kelas, tetapi sejatinya Marxisme tidak serta merta diterima begitu saja oleh golongan nasionalis dan agamis. Mereka menganggap jika Marxistis ingkar terhadap nasionalistis dan ingkar kepada gerakan yang berazas ke-Islaman. Buntut dari hal tersebut pada akhirnya menciptakan perbedaan dan perselisihan paham yang menyebabkan disintegrasi pergerakan. Melihat fenomena tersebut, Bung Karno kemudian memberikan analisisnya tentang Marxisme yang ada di Indonesia. Marxisme saat ini adalah Marxisme dengan taktik yang baru, dia tidak menolak kerjasama antara golongan nasionalistis dan Islamistis. Jaman berkembang dan berubah, maka Marxisme yang kolot sudah ketinggalan zaman. Begitupun dengan kaum nasionalistis dan Islamistis yang anti terhadap Marxisme dan menunjuk gagalnya praktik Marxisme di negara Rusia tidaklah benar-benar mengerti apa itu Marxisme sebenarnya. Taktik Marxisme di Asia tidaklah kaku dan sengit terhadap kaum kebangsaan dan anti kaum keagamaan, tetapi ke-anti-an itu berubah saat ini menjadi persahabatan dan penyokongan. Kita lihat contoh bagaimana Komunis Tiongkok bisa bersahabat dengan kaum nasionalis, kemudian bagaimana persahabatan kaum Marxis dengan kaum Islamis di Afganistan (Sukarno, 2015).

Berdasarkan hal tersebut, Sukarno memandang bahwa ajaran Marx tidak hanya memberi kritik dan perlawanan terhadap kaum kapitalis saja, tetapi juga memberikan harapan yang besar terhadap kehancuran hegemoni kelompok tersebut (Kasenda, 2014). Meski begitu, Bung Karno sebenarnya tidak anti terhadap dialektis antara kelompok pemilik modal dan kaum buruh. Ramalan Marx tentang runtuhnya kapitalisme hanya dijadikan Bung Karno sebagai pelecut semangat pergerakan bagi kaum Marhaen. Meski

begitu, ajaran Karl Marx tidak sepenuhnya bisa diterapkan oleh Bung Karno, karena memandang hal tersebut tidak akan mungkin bisa dilakukan di Indonesia. Sehingga sintesis pemahaman diperlukan untuk mengadaptasi pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan nilai dan karakter bangsa Indonesia. Seperti halnya Bung Karno sebagai seorang nasionalis yang memegang teguh prinsip Ketuhanan, yang mana sebenarnya itu bertentangan dengan ajaran Marxis. Maka tidak heran jika Bung Karno mencoba untuk menggabungkan tiga arus besar pemahaman itu dalam satu pengertian, yaitu Marhaenisme.

Asas Marhaenisme

Marhaenisme sebagai suatu konsep pemikiran perjuangan bangsa dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan tentunya tidak bisa dilepaskan dari unsur-unsur pembentuknya, yaitu asas-asas yang kemudian menjadi satu kesatuan sistem ideologi marhaenisme. Adapun asas-asas pembentuk tersebut meliputi: radikal-revolusioner, *machtvorming*, massa-aksi, non-kooperasi, *self-help & self-reliance*. Radikal-revolusioner yaitu perubahan berdasarkan kehendak zaman yang cepat. Dalam konteks perjuangan, maka radikal revolusioner merupakan perubahan secara cepat yang menginginkan berakhirnya masa imperialisme dan hal-hal yang terkait dengan penindasan serta perampasan hak secara paksa. Radikalisme di dalam kekuatan perjuangan bangsa sangat penting sekali. Radikal dimaknai sebagai hal yang tidak boleh dilakukan setengah-setengah, harus dilakukan dengan keseriusan dan kesungguhan. Maka dari itu, Sukarno selalu menegaskan tentang pentingnya rakyat yang radikal revolusioner, karena tidak ada perjuangan yang bisa mendobrak penjajahan di atas tanah Indonesia tanpa mereka yang benar-benar memiliki pemikiran dan sikap yang radikal revolusioner.

Bung Karno (1964) juga tidak memberikan batasan terhadap makna radikal revolusioner itu sendiri. Orang yang revolusioner tidak hanya mereka yang berpaham sosialis saja, bukan mereka yang dilekatkan padanya sebagai seorang proletar saja, bukan mereka yang berada di atas platform demokrasi formil saja, tetapi mereka yang benar-benar menghendaki masyarakat yang sama rasa dan sama rata tanpa kapitalisme. Revolusioner adalah orang-orang yang menentang imperialisme tidak peduli ia dari golongan apa, tidak peduli ia berpaham apa, tidak peduli ia berdiri di atas platform apa, semua yang menentang adanya penjajahan maka ia adalah seorang revolusioner.

Kemudian *machtvorming*, yaitu penyusunan kekuatan atau penyusunan tenaga. Gerakan marhaenisme tidak akan bisa dilakukan secara optimal jika tidak ditunjang dengan kekuatan politik. Seperti dikatakan oleh Bung Karno (2015) bahwa: "Politik buat saya bukanlah pertama-tama menciptakan suatu idee, politik buat saya ialah menyusun suatu kekuasaan yang terpikul oleh idee. Hanya *machtvorming* yang terpikul oleh idee itulah yang bisa mengalahkan segala musuh kaum marhaen". Jadi, kekuatan atau kekuasaan menjadi modal politik yang mau tidak mau harus dijalankan untuk melawan segala hal yang menjadi musuh marhaen, yaitu penindasan dan ketidakadilan. Namun, kekuatan dan kekuasaan tidak akan berarti tanpa dibarengi dengan idee. Maka *machtvorming* yang dimaksud Bung Karno adalah kekuatan dan kekuasaan yang dilandasi oleh prinsip. Tidak mungkin imperialisme akan tunduk pada tuntutan-tuntutan kaum marhaen jika tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan yang cukup untuk menekan mereka. Bung Karno dalam pledoinya tahun 1930 sempat mengungkapkan gagasan

mengenai *machtsvorming* ini. Menurutnya, *machtsvorming* itu merupakan sebuah perubahan besar yang dilakukan oleh mereka yang menang, tidak boleh ada keraguan dan pertimbangan untung maupun rugi untuk menghimpun *macht* tersebut. Selama rakyat Indonesia belum bisa mewujudkan *macht* yang sesungguhnya, selama rakyat masih belum bisa bersatu seutuhnya dan bercerai berai, selama rakyat belum bisa mendorong kemauan dengan kekuasaan yang teratur dan tersusun, maka imperialisme akan tetap ada di bumi Indonesia sampai kapanpun, bahkan tidak akan mungkin mereka mau menuruti apa yang menjadi tuntutan rakyat Indonesia.

Jika *machtsvorming* sudah benar-benar dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka hal yang penting selanjutnya adalah membentuk massa-aksi. Massa-aksi yaitu segenap kekuatan yang mendukung gerakan perjuangan yang berasal dari seluruh komponen masyarakat Indonesia. Massa-aksi terdiri dari jumlah massa yang sangat banyak jumlahnya, tidak hanya beribu-ribu, tapi berjuta-juta. Dalam artian yang lebih khusus, massa-aksi ditujukan bagi mereka kaum marhaen yang melakukan aksi. Bung Karno menekankan bahwa massa-aksi bukan hal yang dilakukan dikemudian hari, tetapi massa-aksi yaitu sesuatu yang terjadi saat ini, kekuatan massa itu ada dalam keseharian kita, mereka yang bergerak dalam organisasi, mereka yang menulis artikel-artikel di surat kabar, mereka yang membentuk perhimpunan, mereka yang menyelenggarakan rapat khusus, mereka yang melakukan demonstrasi, semua itu adalah bagian dari perjuangan massa-aksinya kaum marhaen.

Machtsvorming dan massa-aksi pada dasarnya menjadi hal yang penting dalam politik Bung Karno, karena kekuatan dan aksi massa yang besar dibutuhkan dalam strategi politik perjuangan. Seperti dikatakan oleh Duverger (2014) ada dua corak pengaruh yang ditimbulkan dari kekuasaan, pertama yaitu politik dilihat sebagai arena pertarungan atau medan pertempuran sehingga kekuasaan pada akhirnya hanya sekedar legitimasi rakyat saja yang pada akhirnya berujung pada perebutan kekuasaan, inilah yang disebut Duverger sebagai antagonism politik. Sedangkan aspek yang kedua, yaitu menganggap bahwa politik merupakan upaya untuk menegakkan ketertiban dan keadilan, sehingga kekuasaan menjadi pelindung bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat untuk melawan berbagai macam kepentingan kelompok tertentu. Maka kekuasaan politik dalam aspek kedua ini memainkan peran yang integratif, memihak dan melindungi kepentingan bersama *vis-à-vis* kepentingan golongan atau kelompok. Bila melihat kedua aspek tersebut, jelaslah bahwa Sukarno memainkan peran penting dalam membentuk kekuasaan dan kekuatan massa-aksi yang bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kemudian non-kooperasi, artinya tidak bekerja sama dengan pihak penjajah. Jika rakyat atau massa bekerja sama dengan penjajah, maka akan sulit untuk meraih cita-cita kemerdekaan Indonesia (Argenti & Dias, 2018). Non-kooperasi merupakan sikap anti kompromi dengan pihak Belanda. Gagasan non-kooperasi ini juga sebenarnya dari tahun 1923 pernah diungkapkan oleh Moh. Hatta yaitu mengutamakan persatuan dan tidak melakukan kerjasama dengan pemerintah kolonial. Meski begitu, ada perbedaan non-kooperasi Sukarno dengan apa yang dikehendaki Hatta. Kasenda (2014) mengungkapkan bahwa menurut Bung Karno, untuk menumbangkan kekuasaan kolonial, maka akan ada pertentangan kebutuhan antara pihak penjajah dan rakyat yang terjajah, dan pertentangan itulah yang kemudian memberi keyakinan kepada rakyat Indonesia bahwa kemerdekaan tidak akan tercapai jika rakyat Indonesia tidak menjalankan politik non-kooperasi. Keyakinan tersebut yang kemudian memunculkan konflik antara Sukarno dan Hatta

karena pada tahun 1932 Bung Hatta sempat ditawarkan untuk menjadi anggota parlemen Belanda, sehingga Bung Karno geram dan menganggap hal tersebut akan membahayakan kelompok nasionalis, karena ia yakin jika penjajah dan rakyat Indonesia tidak mungkin didamaikan. Sukarno sudah menganggap asas non-kooperasi sebagai alat perjuangan untuk memerdekakan Indonesia. Menolak menjadi anggota parlemen Belanda merupakan hal terpuji dan bukanlah sebuah anarki, justru yang anarki jika menolak duduk dalam parlemen nasional. Namun, bagi Hatta, Sukarno justru sudah membelokkan makna sebenarnya dari non-kooperasi, karena ia menganggap non-kooperasi sebagai dogma yang bersifat radikal untuk dijadikan senjata untuk mencapai kemerdekaan. Sukarno sangat meyakini jika non-kooperasi mampu mendatangkan massa-aksi dan *machtsvorming*.

Selanjutnya yaitu *self-help & self-reliance*. *Self-help* sendiri artinya yaitu kemandirian dan tidak bergantung kepada orang lain. Menurut Dedi (2018) bahwa *self-help* sebenarnya dapat dimaknai sebagai apa yang disebut oleh Bung Karno dengan berdikari ‘berdiri di atas kaki sendiri’. Konsep ini dapat menjadi ciri atau karakter dari kemandirian bangsa, yang menjadi indikasi maju tidaknya suatu bangsa. Hal ini saling terhubung dengan asas-asas sebelumnya, bahwa pihak imperialis tidak akan mau memberikan hak-hak yang dituntut oleh negara terjajah, sehingga mau tidak mau kita harus mandiri di segala bidang, maka dengan begitu, kita tidak perlu lagi bergantung kepada bangsa lain. Kemudian *self-reliance*, masih sangat berkaitan dengan konsep berdikari Bung Karno, hanya saja pada *self-reliance* ini lebih menekankan kepada kepercayaan diri. Menurut Mawarti & Sundawa (2016) *self-reliance* “...mengacu pada keadaan yang penuh dengan kemandirian, kreatifitas, keaslian, dan kepercayaan pada kekuatan diri untuk menciptakan kebahagiaan”. Dengan kata lain, *self-reliance* adalah cara bangsa Indonesia untuk mandiri dan percaya pada kekuatan diri sendiri tanpa mengandalkan orang lain untuk memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar sendiri yang mengacu pada nilai-nilai perjuangan yang dianut.

Kelima asas marhaenisme yang telah dijelaskan tersebut kemudian diramu oleh Bung Karno ke dalam istilah sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme. Sosio-demokrasi merupakan suatu sistem yang tidak hanya mengakomodasi kepentingan elit politik saja, tetapi juga bertujuan untuk mengubah nasib rakyat dan menghilangkan kemiskinan. Adapun bentuk dari sosio-demokrasi ini yaitu berupa demokrasi dalam bidang politik serta ekonomi. Latif (2019) sosio-demokrasi merupakan demokrasi yang memperjuangkan keadilan sosial, yang tidak hanya memedulikan hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi, di mana hal tersebut harus berdasarkan asas *self-help & self-reliance*, bukan demokrasi ala Barat atau Eropa. Sosio-demokrasi harus mengakomodasi kepentingan rakyat. Lalu sosio-nasionalisme yaitu nasionalisme yang tidak hanya mengacu pada aspek politik saja, tetapi juga ekonomi. Sosio-nasionalisme bermaksud untuk memperbaiki keadaan masyarakat luas agar tidak lagi tertindas, tidak ada lagi kaum yang celaka, dan tidak ada lagi kaum yang sengsara.

Relevansi Asas Marhaenisme Pasca Reformasi

Di akhir masa orde lama pada rentang waktu 1965-1966, Sukarno ditengarai ingin digulingkan oleh kelompok komunis pimpinan Kolonel Untung yang sebelumnya telah membuat propaganda dengan menyebarkan berita bahwa ada dewan jenderal bentukan Angkatan Darat yang akan mengukudeta Bung Karno. Selanjutnya kejadian tersebut

kemudian berujung pada tragedi berdarah G 30 S/PKI yang mengawali transisi rezim pemerintahan untuk pertama kalinya. Tuntutan massa yang anti komunis membuat legitimasi sang pemimpin besar revolusi tersebut menjadi terancam, karena Bung Karno mendapat sentimen negatif dengan dikaitkan pada tragedi serangan 30 September 1965 dan dianggap melindungi kelompok PKI. Selain itu, hal tersebut juga diperparah oleh stabilitas ekonomi yang menjadi catatan merah pemerintahan Sukarno kala itu sehingga inflasi tidak bisa dihindarkan lagi dan menyebabkan kesengsaraan masyarakat, khususnya mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah (Kasenda, 2013).

Gelombang besar demonstrasi terjadi di mana-mana yang menuntut Sukarno untuk segera melakukan perubahan dan tindakan cepat. Aksi ini kemudian menghasilkan tuntutan yang kita kenal dengan istilah Tritura (tiga tuntutan rakyat); Isi tuntutan tersebut yaitu bubarkan PKI, retool Kabinet Dwikora, dan turunkan harga barang. Bung Karno merespon tuntutan tersebut sebagai sebuah ancaman serius terhadap pemerintahannya. Akhirnya tekanan-tekanan dari mahasiswa dan juga taktik “gerilya” dari pihak Angkatan Darat ketika itu, terutama kelompok yang anti komunis dan berseberangan dengan Bung Karno berhasil menyudutkan beliau untuk mengeluarkan supersemar (surat perintah 11 Maret) yang diberikan kepada Suharto dalam rangka pemberian mandat kekuasaan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Walaupun hingga saat ini kebenaran/keaslian dari supersemar ini masih menjadi bahan perdebatan publik, karena supersemar yang beredar memiliki beberapa versi.

Setelah supersemar diberikan kepada Suharto, Bung Karno secara perlahan mulai kehilangan kekuasaannya, bahkan legitimasi Sukarno sebagai presiden justru malah semakin di ujung tanduk. Pertanggungjawabannya di depan MPRS yang berjudul nawakarsa ditolak dan Sukarno hanya diposisikan sebagai presiden mandataris MPRS hingga Suharto dilantik menjadi presiden pada Maret 1967 karena Sukarno dianggap tidak dapat lagi menjalankan tugasnya sesuai dengan UUD. Orde baru terbentuk, rezim berganti, pemerintahan di bawah kepemimpinan Suharto mulai berjalan. Sang jenderal besar revolusi pun berakhir menjadi tahanan politik rezim orde baru saat itu sampai pada akhir hayatnya. Ideologi marhaenisme pasca lengsernya Bung Karno pun mengalami kemunduran karena dianggap beraliran kiri sehingga menyebabkan pemahaman ini dibatasi gerakannya. Padahal, fakta sejarah membuktikan bahwa marhaenisme tidak bisa dilepaskan dari proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Pada sidang pengusulan dasar negara dalam forum BPUPKI tahun 1945, Sukarno menjawab permintaan dari ketua sidang BPUPKI yaitu Radjiman Wediodiningrat untuk memberikan konsepsi dasar negara dalam pengertian dasar filsafat “*philosophische grondslag*”. Sebelumnya, rumusan-rumusan yang diberikan para tokoh seperti Supomo, Muh. Yamin, Ki Hadi Bagus Kusumo belum bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh ketua BPUPKI. Namun, gagasan-gagasan itu kemudian menjadi masukan penting bagi Sukarno dalam merumuskan konsepsi dasar negara yang dituangkan dalam lima sila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Bung Karno juga menawarkan alternatif kepada forum, jika tidak berkenan dengan lima sila tersebut, maka bisa diperas menjadi trisila, yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Sosio-nasionalisme merupakan hasil perasan dari kebangsaan dan internasionalisme serta dan perikemanusiaan. Lalu sosio-demokrasi yang bukan merupakan demokrasi Barat, tetapi politik ekonomi demokrasi dan politik demokrasi. Kemudian yang terakhir adalah ke-

Tuhanan yang menghormati satu dengan yang lain. Kemudian Bung Karno menawarkan kembali kepada forum, jika tidak suka trisila, dan menginginkan simbolik yang hanya satu saja, maka ditawarkannya konsep ekasila, yaitu gotong royong (Latif, 2019). Jelas bahwa konsepsi yang dikemukakan Sukarno tersebut merupakan hasil dari pemikiran beliau yang telah digali dari pengalaman bangsa serta kondisi bangsa Indonesia dari zaman kerajaan hingga munculnya imperialisme asing. Dalam konsep Pancasila juga terkandung asas-asas marhaenisme Bung Karno yakni sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

Lalu apakah marhaenisme masih relevan dengan situasi saat ini pasca reformasi? Pratama (2021) mengungkapkan bahwasannya:

“Jika marhaenisme dijalankan sebagai ideologi secara luas, mungkin sudah tidak relevan lagi, karena marhaenisme pada dasarnya merupakan ideologi perjuangan yang radikal dan revolusioner untuk membangkitkan semangat juang kaum marhaen melawan borjuisme dan imperialisme kapitalis saat itu. Namun, asas-asas marhaenisme seperti kemandirian ekonomi, keberpihakan terhadap kaum-kaum yang lemah dan tertindas, sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme yang berketuhanan dapat dikatakan masih sangat relevan dengan keadaan saat ini”.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa marhaenisme tidak bisa kita jalankan sesuai dengan konsep asli Bung Karno. Karena sejatinya marhaenisme merupakan alat perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Maka, yang bisa diadaptasi adalah asas-asas marhaenisme itu sendiri yang meliputi sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Bung Karno (2019) sendiri pernah membedakan antara asas, asas perjuangan, dan taktik. Asas merupakan sesuatu yang menjadi dasar tatanan kehidupan masyarakat, tidak terbatas pada apakah kita sudah merdeka atau belum. Asas sejatinya tertanam dalam jiwa setiap rakyat Indonesia. Sedangkan asas perjuangan yaitu usaha-usaha untuk mencapai kemerdekaan, jika sudah merdeka, maka berakhir pula asas perjuangan tersebut. Kemudian taktik, yakni cara-cara yang dilakukan untuk menjaga kemerdekaan itu. Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir kata Bung Karno, melainkan jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur, kemerdekaan hanyalah alat, bukan tujuan. Taktik bisa berubah mengikuti kondisi zaman, maka dengan taktik, masalah serta tantangan bisa dijawab dengan menyesuaikan kepada taktik yang dilakukan. Taktik ibarat bidak catur yang penuh dengan pertimbangan serta kehati-hatian dalam melakukan suatu tindakan agar tidak salah melangkah.

Menurut Pratama (2021) marhaenisme dapat dijadikan sebagai “pemecah” arus gelombang gempuran ideologi asing seperti demokrasi liberal, neo-kolonialisme, dan neo-kapitalisme yang sedang mencengkram Indonesia di awal abad ke-21 saat ini. Marhaenisme bisa dipahami sebagai cara untuk memahami Pancasila secara “kaffah” agar rakyat Indonesia bisa benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan sesungguhnya. Demokrasi dan politik yang dibangun haruslah demokrasi dan politik yang berlandaskan Pancasila, ekonomi yang dibangun haruslah ekonomi Pancasila, kebijakan yang diambil pemerintah juga haruslah berlandaskan Pancasila.

SIMPULAN

Konsep dari marhaenisme Sukarno yaitu mengarah kepada perjuangan kaum marhaen agar bisa terbebas dari imperialisme dan kapitalisme yang eksploitatif. Marhaen sendiri adalah istilah yang diambil Soekarno sebagai representatif rakyat Indonesia yang tertindas dan tidak berdaya. Asas-asas pada marhaenisme meliputi radikal-revolusioner, *machts vorming*, massa-aksi, non-kooperasi, dan *self-help & self reliance*. Kelima asas tersebut kemudian disebut Bung Karno sebagai sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Marhaenisme sendiri berperan dalam menginfiltrasi pemikiran Bung Karno pada saat mengemukakan konsep dasar negara Indonesia yang termanifestasi dalam Pancasila.

Meskipun tidak secara formal termaktub dalam sila, tetapi makna tersirat sempat diungkapkan Bung Karno dalam trisila yang menyertakan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Meskipun marhaenisme sempat mengalami kemunduran, terlebih pada masa orde baru, karena dianggap beraliran kiri yang dipengaruhi pemikiran marxis, tetapi ideologi ini tetap terjaga, walaupun sudah kehilangan pamornya. Namun, relevansi asas marhaenisme masih bisa digali dan dikaji lebih dalam, terutama pada aspek politik, ideologi, dan sosial. Marhaenisme pada dasarnya tidak dapat benar-benar dijalankan secara luas karena fungsinya sebagai ideologi perjuangan, tetapi asas-asasnya masih relevan dan bisa untuk dikaji bersama dalam rangka memperkuat pemahaman kita tentang Pancasila.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu dalam penyelesaian artikel ini, semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama bagi pendidikan kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. (2018). *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*. Yogyakarta: PT. Media Pressindo.
- Al Muchtar, S. (2016). *Ideologi Pancasila*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Argenti, G., & Dias, D. S. I. (2018). Soekarno's Political Thinking About Guided Democracy. *Jurnal Politikom Indonesia*, 3(2), 46–63. <https://doi.org/10.35706/JPI.V3I2.1654>
- Dedi, A. (2018). Pemikiran Politik Soekarno, Bung Hatta, dan Tan Malaka dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(4), 527–532. <https://doi.org/10.25157/DINAMIKA.V4I4.873>
- Dewantara, A. W. (2017). *Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong (Indonesia dalam kacamata Soekarno)*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Duverger, M. (2014). *Sosiologi Politik* (Daniel Dhakidae, Penerj.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Fajar Pratama, F., Asyiah, A. K., & Chandra, D. (2021). Reactualization of Marhaenism Principles to Promote Marginal Community's Social Welfare. *JURNAL PENDIDIKAN ILMU SOSIAL*, 30(1), 72–88. <https://doi.org/10.17509/JPIS.V30I1.29497>
- Kasenda, P. (2013). *Hari-Hari Terakhir Sukarno*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kasenda, P. (2014). *Sukarno Muda Biografi Pemikiran 1926-1933*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kuswono. (2016). Marhaenism: Social Ideology Create by Sukarno. *HISTORIA : Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 4(2), 119–130. <https://doi.org/10.24127/HJ.V4I2.549>
- Latif, Y. (2019). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lumanauw, N. (2015). Jokowi: Marhaenisme Asas Paling Cocok bagi Rakyat Indonesia. Diambil 13 Maret 2022, dari www.beritasatu.com/ website: <https://www.beritasatu.com/politik/297283/jokowi-marhaenisme-asas-paling-cocok-bagi-rakyat-indonesia#!>
- Maimun. (2015). Aktualisasi Pendidikan Keteladanan dalam Meredam Ideologi Radikal di Indonesia Memperkokoh Jatidiri PKn. *Prosiding Seminar Nasional: Penguatan Komitmen Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri PKn*, 255–263. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mawarti, R. A., & Sundawa, D. (2016). Peranan Civic Community dalam Mendorong Pemuda sebagai Pelopor Kemandirian Bangsa (Studi kasus pada komunitas “Pasukan Kresek” di Kabupaten Malang Jawa Timur). *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 16(2), 63–84. <https://doi.org/10.19109/NURANI.V16I2.934>
- Melawati, C. E., & Kuswono. (2018). Marhaenisme: Telaah Pemikiran Sukarno Tahun. *Swarnadwipa*, 2(3), 153–163.
- Mintz, J. S. (2017). *Muhammad, Marx, Marhaen, Akar Sosialisme Indonesia* (Zulhilmiyasri, Penerj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nuopponen, A. (2010). Methods of Concept Analysis-A Comparative Study. *LSP Journal-Language for Special Purposes, Professional Communication, Knowledge Management and Cognition*, 1(1), 4–12.
- Parwanto, I. D. (2015). *Mengerti Pancasila: Paradigma Baru Pendidikan Pancasila*. Solo: Citra Sains Surakarta.
- Pratama, F. F., & Mutia, D. (2020). Paradigma Kualitatif sebagai Landasan Berpikir Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 51–64. <https://doi.org/10.24114/jk.v17i1.18701>
- Sastrapratedja, M. (1991). Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya. In *Pancasila Sebagai Ideologi dalam berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara* (hal. 142–144). Jakarta: BP7.

- Sophiaan, M. (1994). *Kehormatan Bagi yang Berhak: Bung Karno Tidak Terlibat G30S/PKI*. Jakarta: Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (YMKB).
- Sukarno. (1964). *Tjamkan Pantja Sila - Pantja Sila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Sukarno. (2015). *Nasionalisme, Islamisme, Marxisme, Pikiran-Pikiran Soekarno Muda*. Bandung: Segi Arsy.
- Sukarno. (2019). *Pokok-Pokok Ajaran Marhaenisme menurut Bung Karno*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Suseno, F. M. (2015). *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wicaksana, A. W. (2020). *H.O.S Tjokroaminoto Teladan Perjuangan, Kepemimpinan, dan Kesederhanaan*. Yogyakarta: C-Klik Media.